

► PERHUTANAN SOSIAL

Pemahaman Minim Masyarakat Jadi Kendala

JAKARTA — Perkembangan program perhutanan sosial diakui pemerintah masih cenderung lamban seiring minimnya pemahaman masyarakat akan akses program tersebut.

Pemerintah mencatat realisasi program pemberian akses kepada masyarakat untuk mengelola kawasan hutan tersebut baru mencapai 1,5 juta ha. Padahal, pemerintah mengalokasikan lahan hutan seluas 12,7 juta ha untuk program perhutanan sosial.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menargetkan realisasi 2 juta ha hingga 2018 dan 4,4 juta ha hingga 2019.

Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial KLHK Erna Rosdiana mengatakan kapasitas masyarakat masih rendah, terutama soal administrasi dan perencanaan pemanfaatan lahan.

"Mereka bingung, harus buat surat, lalu diajukan ke Menteri [Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan].

Selain itu, mereka enggak ngerti, kalau mengajukan, nanti untuk apa," jelasnya, Jumat (9/3).

Erna menyoroti pentingnya peran tenaga pendamping untuk memberi penjelasan hingga tingkat tapak tentang program ini, termasuk membantu masyarakat mengajukan proposal kepada Menteri LHK.

Untuk itu, pihaknya memperluas tenaga pendamping dari semula hanya penyuluh swadaya, penyuluh kehutanan di Dinas Kehutanan dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di daerah. Bekerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, KLHK kini merekrut pendamping desa.

"Kami berharap nanti bisa semakin banyak yang mendampingi masyarakat. Intinya adalah di pendampingan. Kalau tidak ada pendampingan, yang dikhawatirkan adalah yang masuk *free riders*," ujarnya. (Sri Mas Sari)